



Proyek Fisik Tahun 2015

Sentral Parkir Lumintang Siap Tampung Ratusan Mobil

PENATAAN infrastruktur terus dilakukan Pemkot Denpasar. Dari penataan trotoar, peningkatan jalan lingkungan warga di setiap desa, dan tahun 2015 ini terdapat proyek fisik penataan parkir dengan pembangunan sentral parkir di Taman Kota Lumintang. Tentunya, dengan penataan parkir yang berada di sisi barat Taman Kota Lumintang ini masyarakat yang akan melakukan aktivitas, baik berolahraga maupun pengurusan administrasi di Graha Sewaka Dharma Lumintang dapat merasa nyaman.

Berkaitan dengan pelaksanaan proyek infrastruktur ini, Pemkot Denpasar melalui Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Denpasar I.B. Rahoela mohon maaf atas gangguan yang terjadi selama pengerjaan proyek ini. Rahoela juga mengimbau agar masyarakat berhati-hati di beberapa ruas jalan dekat dengan pengerjaan proyek tersebut, sehingga proyek fisik ini dapat berjalan dengan baik. Hal ini juga berkaitan dengan

keluhan masyarakat yang terganggu selama pengerjaan proyek, seperti pengerjaan proyek sentral parkir, penataan taman koridor di Lapangan Lumintang serta pengerjaan proyek fisik penataan pusat perdagangan Pasar Gunung Agung.

Menurut Kepala Dinas Tata

Ruang dan Perumahan I Made Kusuma Diputra didampingi Kabid Tata Bangunan Ketut Dirga, Rabu (9/9) kemarin, pengerjaan sentral parkir dan fasilitas penunjang di kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang tahap kedua ini, pengerjaan proyeknya telah mencapai 50



PROYEK - Pengerjaan proyek fisik sentral parkir di Taman Kota Lumintang.

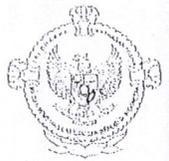
persen. Tahap pertama, pengerjaan proyek pada lantai *basement* yang diperuntukkan sebagai sentral parkir roda empat dan parkir roda dua. Sentral parkir ini siap menampung 200 kendaraan roda empat dan 75 kendaraan roda dua. "Sekarang pengerjaan proyek telah memasuki tahap kedua, dengan tahap pertama pengerjaan *basement* telah berjalan dengan baik," ujarnya.

Dikatakannya, sentral parkir tahap kedua dikerjakan rekanan PT Undagi Jaya Mandiri sebagai pemenang tender pengerjaan proyek dengan konsultan pengawas dari PT Bikarma. Untuk tahap kedua dengan nilai proyek Rp 9 miliar lebih dari pagu anggaran Rp 12 miliar lebih, pengerjaannya 180 hari kalender dan diperkirakan selesai bulan November mendatang. "Jadi, tahap kedua ini dilanjutkan dengan pengerjaan di lantai atas dari sentral parkir," ujarnya.

Tahap kedua ini, menurutnya, akan melanjutkan pembangunan di lantai dua sentral parkir

yang rencananya akan dibangun sebagai gedung balai budaya. Di samping melakukan pembangunan sentral parkir dan fasilitas penunjang, juga dilaksanakan penataan taman koridor di Lapangan Lumintang. Taman sisi utara Lapangan Lumintang tepatnya di lapangan sebelah barat SMPN 10 Denpasar, dilakukan penataan taman koridor. Pengerjaan ini dengan nilai kontrak Rp 941 juta dengan pelaksana proyek CV Nagata Karya sebagai pemenang tender dengan waktu penyelesaian enam puluh hari kalender.

Menurut Kusuma Diputra, pengerjaan proyek ini hingga penyelesaiannya nanti yang dapat lebih mempercantik Taman Kota Lumintang, sedikit mengganggu aktivitas masyarakat yang sedang melakukan olahraga. Tahun yang sama, pengerjaan proyek fisik juga dengan melakukan penataan pusat perdagangan Pasar Gunung Agung. Pembangunan Pasar Gunung Agung berupa penataan los pedagang dengan gedung berlantai dua. (ad559)



Sidang Kasus Dugaan Korupsi BBM ✓

Terdakwa Mengaku Tak Tahu Perusahaannya

KASUS dugaan korupsi BBM dengan terdakwa anggota DPRD Jembrana, I Made Sueca Antara, Rabu (9/9) kemarin memasuki agenda pemeriksaan terdakwa. Dalam sidang yang dipimpin Acmad Paten Sili dengan hakim anggota Beslin Sihombing dan Miftahul, ada pengakuan yang cukup mengejutkan. Dalam sidang kemarin, terdakwa yang naik menjadi dewan dari PDI-P ini mengaku bahwa dirinya sama sekali tidak tahu atas perusahaannya ini.

Sueca mengaku hanya dipinjam nama, lantaran bapaknya sudah dalam kondisi sakit. Akhirnya, dibuatkan akta atas nama dirinya. Bahkan, tanda tangannya untuk izin SITU HO (Surat Izin Tempat Usaha), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), kemudian izin lainnya dipalsukan. "Termasuk, permohonan rekomendasi tanda tangan saya dipalsu. Saya sudah laporkan Nguh Nyoman atas kasus ini," jelasnya.

Dia juga memastikan bahwa terkait keuntungan, dirinya tidak ikut menikmati. Bahkan, ia sama sekali tidak tahu-menahu, keuntungan dinikmati bapaknya dan pemilik Ami Santosa. Munculnya nama Ami Santosa ini, sejatinya sudah terungkap sejak diadilinya terdakwa mantan Kadisperindag Jembrana Ni Made Ayu Ardini. Namun informasi berkembang, bahwa dalam perkara ini, nama yang disebut Sueca itu diduga diselamatkan. Itu juga terbukti dengan kesaksiannya dibacakan karena yang bersangkutan tidak hadir di Pengadilan Tipikor.

Sempat terjadi perdebatan dalam sidang kemarin terkait munculnya nama Ami Santosa. Jaksa juga sempat mengejar peran nama ini. "Memang dia sebagai pemilik, jelas ada dalam akta notaris. Ami memberikan mesin, modal dan ayah saya hanya lahan," sebut terdakwa.

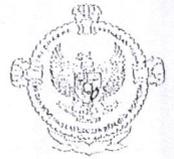
Yang menarik lagi, hakim sempat mengejar terkait rencana Sueca meredam kasus ini setelah diminta oleh Kadisperindag Ayu Ardini dalam pertemuan di rumah makan. Sueca mengakui sudah menemui Kapolres untuk memohon jalan keluar kasus ini.

"Anda minta agar kasus ini ditutup?" tanya hakim. "Tidak, saya hanya minta jalan keluar, namun Pak Kapolres bilang tidak bisa," kilah Sueca.

Dia juga sempat ditanya, lantaran kasus ini aneh. Dua terdakwa malah disidangkan pengadilan umum, namun dia dan Kadiskop malah disidang di pengadilan tipikor. "Setelah kasus ini muncul, Pak Kajari tidak mau mengangkat telepon saya," jawab anggota DPRD dari Fraksi PDI-P ini. "Saya mengadu ke Pak Bupati, diminta untuk menjalani saja," urainya. (asa)

Edisi : Kamis, 10 September 2015

Hal : 3



Soal Dana Pengamanan Pilbup Pekab Batal Gunakan Anggaran Mendahului Perubahan

Bangli (Bali Post) -

Pekab Bangli batal menggunakan anggaran mendahului perubahan untuk dana pengamanan Pilbup Bangli 2015. Alasannya karena menganggap petunjuk yang diberikan Pemprov Bali kurang jelas. Dalam arahnya secara tertulis Pemprov tidak secara tegas melarang maupun mengizinkan penggunaan anggaran mendahului tersebut.



Bali Post/ina
Ida Bagus Giri Putra

Batalnya penggunaan anggaran mendahului perubahan tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Bangli Ida Bagus Giri Putra, Rabu (9/9) kemarin. Dia menjelaskan untuk rencana penggunaan anggaran mendahului perubahan pihaknya sempat melakukan koordinasi dan bersurat ke Pemprov Bali guna memohon arahan dan petunjuk. Akan tetapi, jawaban yang diberikan Pemprov terkesan ngambang.

Pemprov tidak menyebut secara tegas apakah Pekab dibolehkan menggunakan anggaran mendahului atau tidak. "Dalam arahnya Pemprov meminta Pekab agar APBD perubahan segera disahkan. Tidak ada bahasa yang menyebutkan membolehkan ataupun melarang," terangnya. Atas jawaban yang dianggap ngambang itu Pekab pun akhirnya batal menggunakan anggaran mendahului tersebut.

Dengan demikian dipastikan dana pengamanan sebesar Rp 2,2 miliar untuk kepolisian dan Rp 300 juta untuk TNI baru bisa dicairkan setelah pengesahan APBD perubahan. Sebelumnya diberitakan Pekab Bangli sempat mewacanakan akan menggunakan anggaran mendahului perubahan untuk mencairkan dana pengamanan Pilkada. Namun, hingga saat ini rencana tersebut tidak kunjung terlaksana.

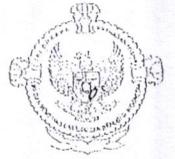
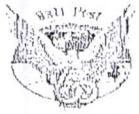
Ketua DPRD Bangli Ngakan Kuta Parwata mengatakan, untuk mencairkan dana pengamanan pilkada sejatinya pihaknya di DPRD Bangli sudah bersepakat menggunakan anggaran mendahului perubahan. Hanya saja, kesepakatan dewan tersebut tidak dibarengi oleh gereget eksekutif. Di mana sampai saat ini belum ada permintaan dari pihak eksekutif untuk menggunakan anggaran mendahului itu.

"Kita dari awal sudah siap memberikan rekomendasi untuk bisa menggunakan anggaran mendahului agar dana keamanan pilkada bisa segera direalisasikan. Tetapi eksekutif tidak meminta surat rekomendasi padahal kita sudah sangat menunggu," terangnya. Sebagaimana tembusan surat hasil koordinasi dan konsultasi yang dilakukan Pekab Bangli ke Biro Keuangan Setda Pemprov Bali, penggunaan anggaran perubahan mendahului pada dasarnya dibolehkan. Sepanjang tidak bertentangan dengan UU.

Adapun anggaran mendahului yang direncanakan Rp 2,2 miliar untuk kepolisian dan Rp 300 juta untuk Kodim 1626/Bangli. Dana tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (Silpa) 2014. (kmb40)

Edisi : Kamis, 10 September 2015

Hal : 8



Sosialisasi PUPNS Terkendala Anggaran ✓

Bangli (Bali Post) -

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bangli hingga saat ini belum melakukan sosialisasi kepada para pegawai terkait pendataan ulang seluruh pegawai negeri sipil (PUPNS). Padahal sesuai pedoman pusat, registrasi PUPNS yang salah satunya bisa dilakukan sendiri oleh para pegawai secara *online* sudah mulai dibuka sejak 1 September lalu.

Kepala BKD Bangli Putu Koesalireni saat dikonfirmasi, Rabu (9/9) kemarin mengakui bahwa hingga saat ini pihaknya memang belum melakukan sosialisasi terkait PUPNS. Adapun penyebabnya karena persoalan anggaran. Dimana untuk melakukan kegiatan sosialisasi pihaknya telah menganggarkan Rp 30 juta dalam APBD perubahan 2015 namun sampai saat ini belum ketok palu.

Dia mengatakan meski pendataan ulang belum

disosialisasikan, namun dalam setiap kesempatan pihaknya sering mensosialisasikan hal tersebut secara lisan kepada seluruh pegawai. Dalam sosialisasi lisan itu pihaknya meminta para pegawai mempersiapkan berbagai kelengkapan yang dibutuhkan untuk registrasi.

Koesalireni mengatakan selain bisa dilakukan sendiri oleh para pegawai secara *online*, registrasi PUPNS juga bisa dilakukan pegawai melalui SKPD masing-masing. "Walaupun bisa melakukan pendaftaran melalui *online*, tapi kami di Bangli akan tetap melakukan pendataan melalui SKPD. Ini kami lakukan agar seluruh pegawai yang berjumlah 7 ribu benar-benar terdata," ujarnya. Sebagaimana yang diketahui, PUPNS sendiri merupakan kegiatan pemutakhiran data PNS yang dilakukan secara *online*. Proses PUPNS akan berlangsung hingga 31 Desember mendatang. (kmb40)

Edisi : Kamis, 10 September 2015

Hal : 8



Bali Post/dwa

PERIKSA - Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta (kanan) memeriksa proyek perbaikan ruas jalan di Desa Lembongan.

Sudah Diaspal, ✓ Jalan Masih Berlubang

Semarapura (Bali Post) -

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta meninjau proyek perbaikan ruas jalan di Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Rabu (9/9) kemarin. Pejabat asal Nusa Ceningan ini menilai kualitas proyek yang menggunakan *coldmix* itu kurang bagus, sehingga harus segera diperbaiki. Peralpnya, permukaan jalan yang telah diaspal masih terlihat berlubang-lubang kecil.

Pengaspalan menggunakan *coldmix* itu merupakan uji coba selama satu minggu. Setelah itu akan dilakukan cek lab di Surabaya, Jawa Timur, untuk mengetahui kualitas kombinasi yang terbaik dari *coldmix*.

Didampingi Perbekel Desa Lembongan Ketut Gede Arjaya dan Kabag Humas Protokol I Wayan Parna, Bupati Suwirta berharap setelah uji coba dan cek lab di Surabaya, kualitas *coldmix* bisa lebih baik dari segi kombinasi. Penggunaan *coldmix* di Lembongan merupakan yang pertama di Indonesia.

Coldmix merupakan salah satu alternatif aspal yang bisa digunakan di daerah terpencil terutama yang transportasinya terbatas. Penggunaan bahan ini diharapkan bisa mengatasi masalah akses jalan di Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan.

Gede Sumardika, Inspektur Pengawas Lapangan, menjelaskan, proyek jalan di Nusa Lembongan sepanjang 12 km, yakni melalui Desa Lembongan dan Jungut Batu. Per hari jalan yang bisa diselesaikan sepanjang 200 meter menggunakan satu *double drum roller* dengan ketebalan 4 cm. *Double drum roller* akan ditambah satu lagi agar proyek pengaspalan jalan bisa diselesaikan sesuai target.

Bahan aspal emulsi yang digunakan pada *coldmix* telah memiliki standar SNI 2011 dan sering digunakan untuk melakukan tambal sulam jalan berlubang pada proyek pemeliharaan jalan. *Coldmix* bukan barang baru dalam dunia perbaikan jalan mengingat sering dimanfaatkan untuk menambal jalan rusak. Namun, untuk pengerjaan pelapisan ulang jalan dengan bidang yang lebar dan sangat panjang, baru pertama kali digunakan. Bahkan, proyek puluhan miliar yang dikerjakan di Nusa Penida ini merupakan pertama kalinya di Indonesia.

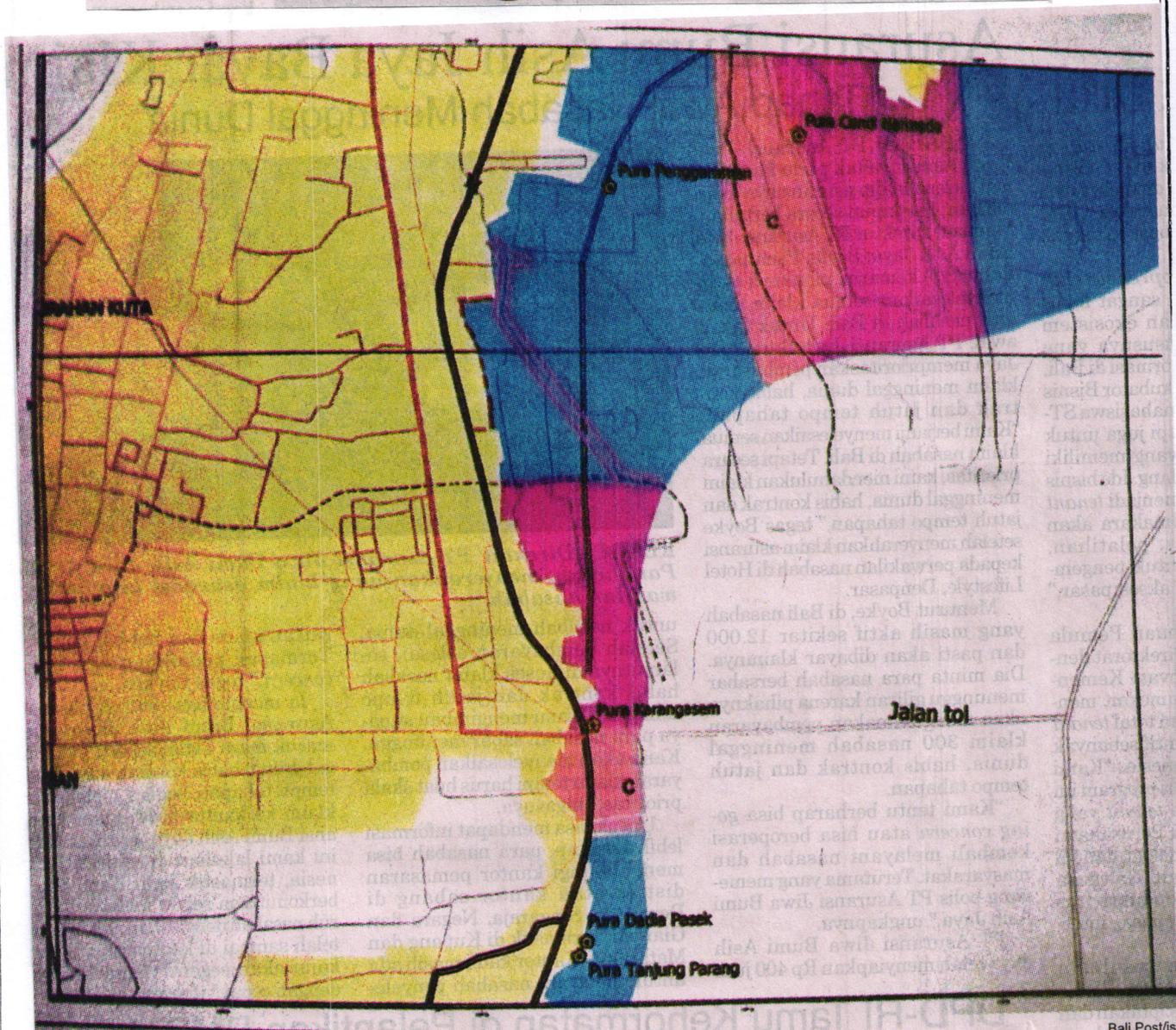
Penggunaan *coldmix* ini untuk mengatasi permasalahan pengiriman material ke Nusa Penida. Bila menggunakan *hotmix*, aspal akan membeku di tengah perjalanan. Proyek pengaspalan jalan di Nusa Penida meliputi Jalan Toyapakeh-Sebunibus dengan anggaran Rp 2,41 miliar, Jalan Jungutbatu-Lembongan Rp 7,34 miliar, dan Jalan Toyapakeh-Suana Rp 10,39 miliar. (dwa)

Edisi : Kamis, 10 September 2015

Hal : 10



Surat Permohonan Perubahan Zona Tahura Pemkab Tegaskan Tak Mengubah Perda



PERUBAHAN - Skema perubahan zona di Tahura yang diajukan ke Provinsi Bali.

Edisi : Kamis, 10 September 2015

Hal : 3



Sambungan - - -

Mangupura (Bali Post) -

Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP) Kabupaten Badung menegaskan jika surat permohonan Penjabat (Pj.) Bupati Badung ke Gubernur Bali terkait surat perubahan zona blok perlindungan di Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai tidak ada kaitannya dengan mengubah perda (peraturan daerah). "Hal itu (surat permohonan - red) bukanlah untuk mengubah perda, tetapi hanya memohon untuk perubahan zona ke Dinas Kehutanan Provinsi Bali di Tahura Ngurah Rai," ujar Kadis BMP Badung Ida Bagus Surya Suamba, Rabu (9/9) kemarin.

Menurutnya, dari zona yang diajukan perubahannya hanyalah pada muara Tukad Mati yang kini tengah dalam pengerjaan *long storage*. Surat itu bertujuan agar proyek normalisasi Tukad Mati bisa dilanjutkan. Bahkan, dalam proyek penanggulangan banjir itu hanya diusulkan blok pemanfaatan khusus pada rencana pembangunan *long storage* di alur muara Tukad Mati sepanjang 1.700 meter dengan lebar 50 meter. "Dengan adanya surat permohonan tersebut, diharapkan proyek normalisasi Tukad Mati dapat dilanjutkan sambil menunggu proses revisi. Sesuai dengan kajian, kami hanya mengusulkan zona sepanjang proyek yang dikerjakan, tidak lebih dari itu," ungkapnya.

Dia juga menunjukkan peta kawasan yang dimohonkan untuk diubah pemanfaatannya untuk kepentingan penanggulangan banjir di Kuta, Seminyak dan sekitarnya. "Dan untuk peruba-

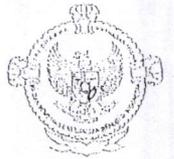
han ini tidaklah untuk mengubah perda. Dan surat saat ini sudah kami ajukan ke Provinsi Bali," katanya.

Kabag Humas dan Protokol Kabupaten Badung A.A. Gede Raka Yuda juga menegaskan bahwa surat yang disampaikan oleh Penjabat Bupati itu adalah perubahan blok Tahura. Kebijakan ini diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 yang merupakan ketentuan detail pemanfaatan Tahura. "Dan bukan perubahan Perda tentang Tata Ruang Wilayah," katanya.

Surat yang disampaikan tersebut, tegasnya, juga merupakan tindak lanjut atas arahan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian LHK Republik Indonesia. "Ini merupakan tindak lanjut dari arahan KSDAE sebagaimana tertuang dalam suratnya," pungkasnya. (kmb27)

Edisi : Kamis, 10 September 2015

Hal : 3



Wacana Jual Aset Tanah "Idle" ✓

Pansus Tak Ingin Semena-mena

PANSUS Aset DPRD Provinsi Bali sempat mengusulkan agar Pemprov menjual aset yang berada di posisi tidak strategis. Dalam hal ini, aset berbentuk tanah yang sulit dijangkau sehingga tidak bisa dimanfaatkan secara optimal. Aset seperti ini kerap disebut tanah *idle*.

Ketua Pansus Aset I Wayan Gunawan, Rabu (9/9) kemarin, mengaku belum mengeluarkan rekomendasi untuk menjual aset tanah *idle* kepada gubernur. Pasalnya, harus ada kajian yang mendalam serta tidak boleh semena-mena. Mengingat, ada aturan khusus yang mengatur soal itu.

"Nanti kita bicarakan, kriteri-

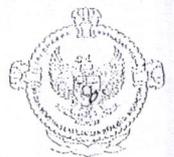
anya kan harus ketat dan kita kan harus kaji. Jadi tidak semena-mena, itu tanggung jawab yang besar buat saya sebagai Ketua Pansus," ujarnya.

Gunawan menambahkan, pihaknya akan melanjutkan kembali pembahasan tentang aset mulai 18 September mendatang. Tugas Pansus Aset akan terus berlanjut hingga bulan Desember.

Sebelumnya, politisi Golkar ini berpendapat aset-aset yang kurang produktif tetapi bisa dimanfaatkan untuk kegiatan kemasyarakatan lebih baik dijual daripada membebani APBD.

Hal. 19
Pelayanan Publik

Edisi : Kamis, 10 September 2015
Hal : 1



Sambungan - - -

Pelayanan Publik

Dari Hal. 1

Dengan kata lain, aset Pemprov yang tidak bisa dibangun untuk pelayanan publik, lebih baik dijual saja kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Apalagi, tanah-tanah *idle* juga sulit untuk dijadikan fasilitas umum. Bisa jadi, lokasinya terlalu kedalam atau tidak bisa dijangkau kendaraan.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Biro Aset Pemprov Bali I Ketut Adiarsa mengatakan usulan dewan untuk menjual aset tanah *idle* memang me-

mungkinkan. Kalau memang disetujui demikian, proses penjualan aset harus melalui mekanisme lelang umum dari Pejabat Lelang Negara. "Nanti hasil penjualan ini untuk membeli aset lagi yang bisa dalam satu hamparan, memudahkan dari sisi pengamanan dan pemanfaatan. Aset *idle* juga memungkinkan untuk ditukar-menukar," ujarnya.

Adiarsa mengaku Pemprov Bali saat ini tengah berbenah dalam hal aset. Pemprov fokus pada pemeliharaan dan pengamanan aset. Mengingat, aset

tanah Pemprov memiliki nilai ekonomis tinggi sehingga berpotensi besar terjadi penyerobotan lahan oleh pihak lain. Pihaknya secara bertahap terus meningkatkan pengamanan dari segi administrasi, fisik, dan hukum.

"Setelah aman secara administrasi, kita tindak lanjuti dengan pengamanan fisik berupa pemasangan patok khusus dan papan nama, serta pemagaran. Terakhir, pengamanan hukum, harus jelas dasar hukum penguasaan aset melalui sertifikat," jelasnya. (kmb32)